**UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP DAMPAK *OVER CAPACITY* NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(STUDI KASUS DI LAPAS KELAS I MALANG)**

Lailatul Masruroh,¹ Rahmatul Hidayati,² Budi Parmono,³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
JL. MT. Haryono No. 193 Malang, 56144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
Lailatulmasruroh300@gmail.com

ABSTRACT

In Article 1, paragraph (1) of Law No.22 of 2022 concerning Corrections, the term "penal institution" refers to an institution or place that carries out the function of rehabilitation for prisoners. However, over time, the purpose of imprisoning prisoners has been filled with obstacles and has had suboptimal implications, which may even lead to the failure of the correctional institution itself. Along with the development of society, this is also accompanied by the emergence of various new forms of crime and an increase in the quality and quantity of criminal acts among inmates in correctional facilities. Overcapacity causes problems within the correctional institution, such as a decrease in supervision and security. As a result, the original function of the correctional facility as a place for rehabilitation has evolved into a new hub for criminal activities.

Keywords: Penal Institution, Over Capacity, Prisoner.

ABSTRAK

Pada pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan lembaga pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Akan tetapi pada seiring berjalannya waktu, tujuan pemenjaraan narapidana penuh dengan hambatan dan mempunyai implikasi yang kurang optimal, bahkan mungkin menyebabkan kegagalan fungsi lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Seiring dengan perkembangannya masyarakat, hal ini juga dibarengi dengan munculnya berbagai bentuk kejahatan baru serta meningkatnya kualitas dan kuantitas tindak pidana pada warga binaan lembaga pemasyarakatan. *Over Capacity* menyebabkan masalah di dalam Lembaga Pemasyarakatan, seperti penurunan pengawasan dan keamanan. Akibatnya, fungsi awal lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana telah berkembang menjadi tempat tingkat kriminalitas baru

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Kelebihan Kapasitas, Narapidana.

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 angka 6 BAB I Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2022 ttg Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

pemasyarakatan. Status narapidana diberikan kepada terpidana yang sudah tercatat dalam buku register lapas dan yang bersangkutan menjalankan pidananya. Pembinaan narapidana secara institusional di Indonesia dikenal sejak diberlakukannya Reglemen penjara Stbl. 1917 NO. 708 hingga Tahun 1963. Kemudian pembinaan mengalami pembaharuan sejak mengenal sistem pemasyarakatan dengan karakteristik yang memuat 10 prinsip pokok pemasyarakatan yang semuanya bermuara pada satu falsafah, narapidana bukan orang hukuman.⁴

Dalam penerapan hukum di wilayah Indonesia, terdapat hukuman yang dikenal sebagai pidana penjara. Terdapat dua macam jenis pemidanaan atau penjatuhan hukuman yakni; pidana pokok serta pidana tambahan. Yang mana dua tersebut telah disebutkan pada Pasal 10 KUHP. Di dalam pidana pokok tergolong dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pada pidana tambahan yakni berupa pengumuman putusan hakim, pencabutan hak-hak tertentu, dan perampasan pada barang-barang tertentu. Untuk penahanan yang diberikan pada narapidana atau tahanan biasanya akan ditempatkan pada lapas maupun rutan (rumah tahanan). Lapas sebuah subsistem peradilan pidana, yang mana fungsinya sebagai pada Pasal 1 angka 6 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa pengertian narapidana sendiri ialah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Maka sebab itu, seseorang tidak dapat disebut sebagai narapidana selama kasusnya (perkara tersebut) masih dalam proses peradilan serta pada upaya hukum yang lain. Karena pada dasarnya, rutan adalah tempat tinggal bagi tahanan, sedangkan narapidana di Lapas memiliki tempat tinggal yang telah disediakan sendiri. Sehingga over kapasitas ini terjadi sebab dampak digabungnya antara Tahanan dengan Narapidana.⁵

Over kapasitas menyebabkan masalah di dalam Lapas, seperti penurunan pengawasan dan keamanan. Akibatnya, fungsi awal lapas sebagai tempat pembinaan narapidana telah berkembang menjadi tingkat kriminalitas baru, seperti kekerasan terhadap antar narapidana (penganiyaan),

⁴ Rahmatul Hidayati, "Remisi bagi Narapidana Narkotika". Batu: Literasi Nusantara, (2021). Hal. 73

⁵ "Mayoritas Lapas dan Rutan di Jawa Timur Over Kapasitas," CNN Indonesia, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210909195304-12-692244/mayoritas-lapas-dan-rutan-di-jawa-timur-over-kapasitas> . Access 19 September 2023

pengedaran narkoba, serta kejahatan-kejahatan yang lain. Jika dipandang dalam segi teoritik dapat disimpulkan jika kelebihan kapasitas dapat menyebabkan prisonisasi (*prisonization*). Pada dasarnya, prisonisasi terbenwntuk sebagai reaksi terhadap masalah penyesuaian diri yang ditimbulkan sebagai akibat pidana penjara itu sendiri dengan berbagai bentuk perampasan (*deprivation*).⁶ Bentuk dari pronisasi bisa bermacam-macam, seperti perampasan yang dilakukan antar narapidana, pencurian didalam kamar, perkelahian antar kelompok narapidana, perpeloncoan terhadap narapidana baru, homoseksual, pengelompokan narapidana berdasarkan wilayah, penggunaan bahasa khusus yang membuat narapidana sulit dikenal oleh orang luar, dan kode etik untuk menjaga dalam hal yang disembunyikan (rahasia) sesama antar narapidana.

Dalam kenyataannya, pronisasi juga mendatangkan dampak negatif utamanya bagi pelaku kejahatan yang tidak disengaja (pendatang baru di dunia kriminal). Ini karena penjahat kebetulan (*accidental offenders*) dirusak melalui pengalaman-pengalamannya dengan penjahat kronis. Keburukan yang sangat besar di penjara ini tidak dapat dihilangkan bahkan oleh personel yang baik sekalipun.⁷ Proses resosialisasi narapidana akan sangat terhambat oleh sikap dan prinsip yang dipegang oleh narapidana dalam masyarakat mereka. Dalam menangani kasus *over* kapasitas Lapas, hal ini juga menjadi kewajiban para pembuat kebijakan dan pejabat terkait, sebab dikhawatirkan dapat mempersulit proses pembinaan narapidana serta mengurangi penekanan pada angka kriminalitas di masa depan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ditarik rumusan masalah , yaitu : Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya *over capacity* pada Lapas kelas I Malang? Bagaimana dampak yang ditimbulkan *over capacity* di Lapas kelas I Malang terhadap pemenuhan hak-hak narapidana? Bagaimana kendala yang dihadapi serta upaya penanggulangan Lapas kelas I Malang dalam menangani *over capacity*?

PEMBAHASAN

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya *Over capacity* Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Lapas kelas I Malang, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kelebihan kapasitas di dalam Lapas tersebut. Seperti yang

⁶ Angkasa, "Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana," *Jurnal Dinamika Hukum* 10. No. 3 (2010): Hal. 2015

⁷ Muladi, Barda Nawawi Arief, "Teori-teori dan Kebijakan Pidana." Bandung: Alumni (1984), Hal. 79

diungkapkan oleh Bapak Budi Purwadi, Kepala Bidang Pembinaan, Faktor-faktor tersebut dapat dijabar sebagai berikut:⁸

- a. Banyaknya tahanan serta narapidana yang dikirim oleh pihak kepolisian dan kejaksaan kedalam Lapas. Meskipun kenyataannya Lapas sendiri telah mengalami kelebihan kapasitas, sedangkan pihak Lapas tidak memiliki kuasa/kewenangan untuk menolak adanya narapidana dan tahanan yang dipindahkan.
- b. Faktor mudahnya seseorang ditahan ketika disangka atau didakwa melakukan tindak pidana. Dalam pasal 21 KUHAP, penahanan dilakukan dengan tujuan yang telah diatur dimana: Tersangka atau terdakwa diduga akan melarikan diri, Merusak atau menghilangkan barang bukti, Mngulangi tindak pidana. Padahal seharusnya penahana adalah hal yang tidak wajib dilakukan, karena hakekatnya penahanan adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Disamping itu tidak semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, tetapi hanya kepada tersangka atau terdakwa atas tindak pidana yang memiliki ancaman lebih dari 5 tahun atau melanggar Pasal yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) butir b.

Landasan tindak pidana adalah Asas Legalitas, sedangkan landasan memidana pelakunya adalah asas kesalahan. Arinya pelaku akan mendapatkan hukuman apabila ia melakukan kesalahan dalam melakukan tindak pidana. Berdasarkan argumentasi diatas, mengenai pertanggungjawaban pidana, Sudarto mengatakan, agar seseorang dapat di pidana tidak hanya dilihat dari perbuatannya yang bertentangan dengan hukum, tetapi orang tersebut harus mempunyai kesalahan subjektif. Dalil-dalil diatas memberikan pengertian bahwa unsur bersalah atau unsur pertanggungjawaban pidana dalam arti luas, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab
 2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan berupa kesengajaan dan kelalaian, atau dapat disebut juga bentuk kesalahan;
 3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau pemaaf.⁹
- c. Tingginya angka kejahatan atau tindakan kriminal yang terjadi pada lingkup masyarakat. Data terakhir yang diperoleh pada bulan Desember 2023 melalui data dalam bentuk tabel

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Purwadi, Selaku kepala Bidang Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang, Tanggal 23 Desember 2023

⁹ Dia Lizza Elina, Budi Parmono, Rahmatul Hidayati, "Corporate As a Criminal Act Of Corruption in Indonesia", *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*. Vol. 5 No. 3 (2022) Hal. 22527

yang termuat dalam lampiran tingkat kejahatan sebanyak 352 orang tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang.

- d. Kurang maksimalnya penggunaan jenis pemidanaan lain selain penjara. Di dalam KUHP sebenarnya telah dijelaskan bahwa terdapat 5 jenis pidana pokok yakni: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan tutupan. Akan tetapi kenyataannya putusan pidana lebih sering dijatuhkan sehingga pada akhirnya menyebabkan pidana pokok lain sering terlupakan.
- e. Tingkat residivis yang mana masih tinggi. Seorang yang melakukan tindak pidana kembali bisa terjadi karena beberapa hal, salah satunya karena faktor ekonomi atau kebutuhan hidup serta masyarakat yang menstigma buruk dan tidak menerima keebradaan mantan pelaku tindak pidana tersebut. Yang mana mantan pelaku tindak pidana ini tidak dapat menerapkan hasil pembinaan di Lapas sehingga terdorong untuk melakukan tindak pidana lagi.
- f. Adanya aturan pengetatan remisi bagi narapidana kasus korupsi dan penyalahgunaan narkoba. Remisi dalam sistem pemasyarakatan diartikan sebagai potongan hukuman bagi warga binaan setelah memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 huruf (a) Undang-undang No 22 tahun 2022 ttg Lembaga Pemasyarakatan yang menyebutkan jika salah satu hak narapidana yakni mendapatkan pengurangan pidana atau dikenal sebagai remisi.

Akan tetapi pemerintah mengeluarkan aturan yang mana disebutkan dalam pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 ttg Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga binaan Pemasyarakatan yakni untuk memperketat pemberian remisi kepada warga binaan kasus korupsi serta kasus penyalahgunaan narkoba, yang mana bunyi Pasal tersebut ialah pemberian remisi terhadap Warga binaan kasus korupsi dan penyalahgunaan narkoba selain berkelakuan baik yang telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana, terpidana harus memenuhi syarat antara lain bersedia bekerjasama dengan penegak hukum utk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (*justice collaborator*), dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dgn putusan hakim.

Kondisi kelebihan kapasitas menjadi tantangan yang harus dilalui Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dalam mengadaptasikan inovasi pelayanan masyarakat dan warga binaan yang aman dan juga nyaman. Persoalan ini menimbulkan kondisi tidak ideal dan tentunya mempengaruhi pelayanan pemasyarakatan yang optimal. Sehingga berdampak pada terganggunya fungsi pelayanan dan pembinaan, menurunnya kualitas penghuni Rutan dan peluang gangguan keamanan meningkat.

Dampak Yang Ditimbulkan *Over Capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak-hak Narapidana

Masalah kelebihan kapasitas narapidana terjadi di hampir semua Lapas di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Timur. Hal ini menyebabkan beberapa masalah, seperti tidak tercapainya tujuan utama Lapas yaitu pembinaan narapidana. Selain itu, kelebihan kapasitas juga dapat menyebabkan munculnya kejahatan baru sebagai akibat dari situasi tersebut. Berikut data kekurangan efektifitas dalam pembinaan dari segi pemenuhan hak-hak Narapidana:

No	Hak-hak Narapidana	Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1.	Melakukan Ibadah	√		
2.	Mendapatkan perawatan baik rohani maupun jasmani		√	
3.	Mendapatkan pendidikan dan pengajaran		√	
4.	Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak		√	
5.	Mendapatkan layanan informasi	√		
6.	Mendapatkan penyuluhan hukum atau bantuan hukum		√	
7.	Menyampaikan keluhan		√	
8.	Mendapatkan bahan bacaan dan media massa lainnya		√	
9.	Mendapatkan pengurangan masa pidana	√		
10.	Mendapatkan asimilasi atau cuti mengunjungi keluarga		√	
11.	Mendapatkan pembebasan bersyarat	√		
12.	Mendapatkan cuti menjelang bebas	√		

Sumber : Wawancara dengan Bapak Budi Purwadi Selaku Kepala Bidang

Dari keterangan tabel yang terdapat diatas kekurang terpenuhi hak-hak Narapidana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Narapidana kurang mendapatkan perawatan dengan baik rohani maupun jasmani. Hal ini disebabkan dengan kondisi sedikitnya tenaga medis yang ada menyebabkan harus mengantri lama untuk mendapatkan pemeriksaan oleh tenaga medis.
2. Kurang mendapatkan pendidikan dan pengajaran sebagaimana yang seharusnya diterima. Pengajaran yang berupa program belajar kejar paket A, paket B dan paket C hanya dilakukan seadanya oleh tenaga pengajar yang seadanya pula, yakni oleh sesama narapidana.
3. Kurangnya pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana menjadi masalah di Lapas Klas I Malang. Setiap hari, narapidana hanya mendapatkan tiga kali makan dengan menu yang sederhana, yaitu nasi dengan tahu tempe. Namun, nasi yang disajikan seringkali sudah kering dan tidak memenuhi standar makanan yang layak.
4. Kurangnya dalam mendapatkan penyuluhan hukum atau bantuan hukum. Disebabkan begitu besarnya jumlah narapidana dan minimnya fasilitas yang ada di dalam Lapas kelas I Malang sehingga kegiatan tersebut tidak bisa diikuti secara menyeluruh oleh semua narapidana.
5. Banyaknya penghuni yang terdapat pada Lapas Klas I Malang membuat narapidana kesusahan dalam mendapatkan pelayanan untuk menyampaikan keluhan.
6. Masih minimnya bahan bacaan serta media massa yang diperuntukkan bagi narapidana di Lapas Klas I Malang.
7. Masih kurangnya narapidana yang mendapatkan kesempatan asimilasi atau cuti keluarga. Disebabkan terlalu banyaknya narapidana yang menjadi penghuni di Lapas maka hak tersebut tidak diberikan dengan sama rata untuk semua.

Tidak hanya itu akan tetapi juga ada beberapa dampak yang timbul terhadap narapidana akibat terjadinya over capacity yang ada di dalam Lapas, yakni:

1. Kurangnya sanitasi yang memadai menjadi masalah yang berdampak pada kesehatan narapidana di Lapas Klas I Malang. Kapasitas kamar narapidana seharusnya hanya untuk 25 orang, namun sering kali dihuni oleh 40 orang.
2. Para narapidana menghadapi kesulitan dalam beristirahat dan beraktivitas di dalam lapas, yang akhirnya mengganggu hak-hak mereka. Salah satu hak yang terganggu adalah hak kesehatan, dimana seharusnya para narapidana memiliki hak untuk menjalani pemeriksaan

kesehatan sekali dalam sebulan. Namun, karena ketidakseimbangan antara jumlah tenaga medis dan jumlah narapidana, hak tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Kelebihan kapasitas juga berdampak pada pembinaan kemandirian narapidana. Dampaknya adalah kurangnya ruang untuk melaksanakan pembinaan serta kekurangan jumlah petugas yang bertindak sebagai instruktur pembinaan.
4. Kelebihan jumlah narapidana dalam setiap kamar dapat memicu timbulnya konflik antara mereka, yang pada akhirnya dapat berujung pada perkelahian. Keadaan ini dapat menjadi faktor kriminogenik, yang berpotensi meningkatkan tindakan kejahatan di dalam lapas.

Dengan kondisi SDM petugas masyarakatan yang ada, maka terlihat bahwa hal ini dapat berpengaruh serta memperlambat proses dari Lapas tersebut, selain itu permasalahan overkapasitas tentu menjadi penyebab kurang optimalnya pengawasan serta perawatan yang dilakukan oleh petugas Lapas dan pada akhirnya mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari sistem pemidanaan. Hal ini tak ayal menyebabkan banyak terjadi penyimpangan di dalam lembaga masyarakatan..

Kendala Yang Dihadapi Serta Upaya Penanggulangan Pihak Lembaga Masyarakatan Kelas I Malang Terkait *Over Capacity*

1. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak Narapidana

Kendala yang dihadapi di Lembaga Masyarakatan Kelas I Malang disebabkan oleh kelebihan kapasitas penampungan. Hal ini berdampak pada kesulitan dalam memenuhi hak-hak narapidana. Meskipun kapasitasnya seharusnya hanya untuk 1.500 penghuni, saat ini jumlah penghuni di Lembaga Masyarakatan Kelas I Malang mencapai sekitar 2.800 orang.

Berdasarkan penemuan fakta lapangan yang saya temukan, terdapat beberapa hambatan yang disebabkan oleh kelebihan kapasitas tersebut. Kendala-kendala yang dialami oleh Lembaga Masyarakatan Kelas I Malang meliputi:¹⁰

- a. Terdapat keterbatasan ruang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap narapidana. Akibatnya, kegiatan yang seharusnya dapat diikuti oleh seluruh narapidana yang ada, hanya dapat diikuti oleh beberapa narapidana yang terpilih. Contohnya,

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Parmono, Selaku Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Masyarakatan Kelas I Malang, tanggal 26 Desember 2023

narapidana yang dipercaya oleh petugas Lapas dan narapidana yang baru masuk ke dalam Lapas.

- b. Pengawasan oleh petugas keamanan di Lapas tidak optimal karena jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah penghuni Lapas. Satu regu pengamanan terdiri dari 64 orang yang dibagi menjadi shift dengan 12 orang. Oleh karena itu, dapat dibayangkan bahwa hanya 12 orang petugas keamanan yang harus mengawasi sekitar 2.800 penghuni Lapas. Akibat pengawasan yang kurang maksimal, dapat terjadi penyelundupan barang-barang yang tidak diizinkan, terutama saat kunjungan oleh keluarga. Namun, hal ini diantisipasi dengan pemeriksaan di gerbang dan inspeksi mendadak oleh petugas keamanan. Kurangnya pengawasan oleh petugas merupakan faktor yang dapat memicu terjadinya kejahatan di dalam Lapas.
 - c. Kelebihan kapasitas Lapas dapat menyebabkan konflik antara warga binaan yang berujung pada perkelahian. Ketika terlalu banyak penghuni yang tinggal dalam satu ruangan, kemungkinan terjadinya gesekan antara mereka menjadi lebih tinggi. Hal ini dapat mengganggu keamanan Lapas dan menyebabkan terjadinya perkelahian serta insiden serupa.
 - d. Kesehatan warga binaan terancam karena kelebihan kapasitas di setiap kamar. Dampak dari situasi ini adalah petugas Lapas menghadapi kesulitan dalam mengontrol setiap warga binaan karena jumlah yang terlalu banyak dalam ruangan yang sempit.
 - e. Kondisi hunian atau kamar sel tidak sesuai dengan kapasitas sehingga terlihat kumuh dan kurangnya sirkulasi udara yang masuk. Tentu jelas kondisi tersebut dapat mempengaruhi kesehatan serta kebersihan lingkungan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- 2. Bentuk upaya oleh lembaga pemasyarakatan Kelas I Malang terhadap pemenuhan hak kepada Narapidana**

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang, upaya pemenuhan hak-hak narapidana dilakukan melalui inovasi layanan, pemenuhan standar pelayanan, serta peningkatan fasilitas sarana dan prasarana. Hal ini merupakan strategi yang diadopsi oleh lembaga tersebut untuk mengimplementasikan hak-hak narapidana. Selain itu, dalam upaya

pembinaan narapidana, Lapas Kelas I Malang juga berusaha mengurangi dampak *Over Capacity* dengan beberapa langkah, antara lain:¹¹

- a. Meningkatkan mutu pelayanan yang berhubungan dengan identitas pribadi narapidana, seperti menyelenggarakan pendampingan spiritual baik untuk mereka yang beragama Islam maupun non-Muslim, memberikan pelatihan dalam bidang bimbingan kerja, serta membangun fasilitas untuk memfasilitasi proses asimilasi dan memberikan edukasi melalui workshop pengelasan
- b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga binaan dengan membangun poliklinik Lapas, yang menyediakan obat-obatan darurat, menyediakan ruang isolasi pribadi untuk narapidana yang terkena penyakit menular, serta menyediakan petugas kesehatan.
- c. Peningkatan kualitas hasil kerja warga binaan dimana hasil kerja berupa karya akan dipublikasikan, dipromosikan, dan dijual. Dimana dari hasil penjualan tersebut setengah nya akan diberikan kepada narapidana yang menghasilkan karya.
- d. Program asimilasi dan reintegrasi sosial merupakan salah satu strategi jangka panjang yang dilakukan untuk mengurangi kelebihan kapasitas di Lapas. Program reintegrasi sosial ini merupakan tahap terakhir dari proses pembinaan yang diberikan kepada narapidana di Lapas. Tujuannya adalah untuk mendekatkan narapidana kembali ke masyarakat, sesuai dengan prinsip pemasyarakatan bahwa narapidana harus diperkenalkan kembali dan tidak diisolasi dari masyarakat selama masa hukumannya.

3. Upaya preventif dan represif dari pihak Lapas Kelas I Malang terhadap pengulangan tindak pidana didalam Lapas yang berkaitan dengan dampak *Over Capacity*

a. Upaya *Preventif*

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan tindak pidana, Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Kelas I Malang telah melakukan beberapa upaya preventif. Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya pelanggaran baik yang bersifat ringan maupun berat. Beberapa upaya preventif yang telah dilakukan antara lain:

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Faid Uzman, Selaku Petugas BIMPAS Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang, Tanggal 26 Desember 2023

- 1) Lebih banyak melakukan pendekatan terhadap warga binaan di dalam fasilitas penahanan. Hal ini bertujuan untuk memahami kondisi warga binaan yang berada di dalam blok dan kamar. Pentingnya pendekatan individu kepada setiap warga binaan adalah agar petugas dapat memperoleh informasi mengenai kondisi mereka di masing-masing blok dan kamar.
 - 2) Melakukan penggeledahan secara teratur tanpa memberi tahu warga binaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada barang-barang terlarang yang dimiliki oleh warga binaan.
 - 3) Melakukan pengawasan rutin di setiap blok warga binaan. Tindakan ini dilakukan dengan mengunjungi setiap blok dalam interval waktu tertentu, dengan tujuan untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh warga binaan.
- b. *Upaya Represif*

Upaya represif adalah strategi yang digunakan untuk mengatasi kejahatan setelah kejahatan tersebut terjadi. Upaya represif yang selama ini dilakukan oleh pihak petugas lembaga pemasyarakatan diantaranya ialah:

- 1) Melakukan prosedur keamanan dan ketereiban lembaga pemasyarakatan sesuai dengan dengan yang diamanatkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013. Pelaksanaan yang dilakukan yakni terkait hak dan kewajiban warga binaan, penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.
- 2) Jika terjadi perkelahian ringan, maka akan dilakukan proses pendamaian secara kekeluargaan oleh petugas keamanan yang bertugas.
- 3) Jika terjadi tindakan kekerasan yang berlebihan maka akan diberikan hukuman disiplin tingkat berat menurut Pasal 9 ayat 4 huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 6 Tahun 2013. Sesuai Pasal 9 ayat 4 huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, Hukuman disiplin tingkat berat meliputi: memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

- 4) Jika terjadi tindakan kekerasan yang berlebihan maka akan diberikan hukuman disiplin tingkat berat menurut Pasal 9 ayat 4 huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 6 Tahun 2013. Sesuai Pasal 9 ayat 4 huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, Hukuman disiplin tingkat berat meliputi: memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.
- 5) Demi segi keamanan pihak yang terlibat pelanggaran yang berat maupun tergolong tindak pidana maka pihak tersebut akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain. Selain demi keamanan yang bersangkutan, pemindahan juga dilakukan demi memutus jaringan provokasi yang dapat terjadi antara warga binaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *over capacity* pada Lembaga Pemasyarakatan disebabkan terlalu banyaknya transferan atau pemindahan terhadap tahanan dan narapidana oleh pihak penegak hukum (kejaksaan dan kepolisian). Faktor mudahnya seseorang ditahan ketika telah disangka atau didakwa melakukan tindak pidana. Juga tingginya angka kejahatan atau tindakan kriminal yang terjadi pada lingkup masyarakat. Kurang maksimalnya penggunaan jenis pemidanaan lain selain penjara, padahal didalam KUHP sudah dijelaskan bahwa terdapat lima jenis pidana pokok yang mana; pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda serta tutupan. Juga faktor yang terakhir karena tingkat residivis yang mana masih tinggi.
2. Dampak dari kelebihan kapasitas Lapas Klas I Malang menimbulkan kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran mulai dari pelanggaran kode etik hingga pelanggaran yang mengandung unsur pidana, antara lain dapat memicu perselisihan antar narapidana hingga berujung pada perkelahian. *Over kapasitas* juga berdampak pada situasi dimana mengakibatkan sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan dan menimbulkan penderitaan baru. Selain

itu hak untuk menyampaikan keluhan terhadap perlakuan petugas atau sesama narapidana pun terganggu. Sanitasi yang buruk dan gaya hidup yang tidak sehat sebagai akibat dari kelebihan kapasitas menjadi penderitaan tambahan yang diterima narapidana serta warga binaan pemasyarakatan. warga binaan seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan, tetapi hak tersebut tidak ditegakkan disebabkan jumlah tenaga medis yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan. kelebihan kapasitas memenuhi kapasitas per unit untuk mengembangkan kemandirian, yang dapat menyebabkan residivisme karena narapidana tidak memiliki keterampilan yang dapat dipekerjakan ketika mereka meninggalkan lembaga pemasyarakatan.

3. Upaya yang dilakukan Lapas Kelas I Malang ialah melakukan upaya preventif seperti: melakukan pendekatan terhadap warga binaan di dalam wisma; petugas Lapas melakukan pengeledahan secara rutin tanpa sepengetahuan warga binaan. Kemudian langkah yang dilakukan Lapas Kelas I Malang dalam upaya penanggulangan ialah: Pelaksanaan yang dilakukan yakni terkait hak dan kewajiban warga binaan, penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Jika terjadi perkelahian ringan, maka akan dilakukan proses pendamaian secara kekeluargaan oleh petugas keamanan yang bertugas. Jika terjadi tindakan kekerasan yang berlebihan maka akan diberikan hukuman disiplin tingkat berat meliputi memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F (catatan pelanggaran WBP). Para warga binaan yang melakukan pelanggaran berat maupun tergolong tindak pidana akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain dengan tujuan yakni terhadap keamanan pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahmatul Hidayati, “*Remisi bagi Narapidana Narkotika*”, Batu: Literasi Nusantara (2021)
- Muladi, Barda Nawawi Arief, “*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*”, Bandung: Alumni (1984)
- Abdurrahman, Soejono. *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*. 2 ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Diyah Irawati. *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: UKI Press, 2008.

- Petrus Irwan Panjaitan, Pandapotan Sromangkir,. Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Sujoko, Imam, Aida Humaira, Edwin Syarif, and Nurul Adhha. "Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia." Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Mohammad Taufik Makarao, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006.
- Muhammad Fajar Septianto, Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.
- Soerjono Soekanto, Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- E. Utrecht, Hukum Pidana I. Jakarta: Universitas jakarta, 1958.
- Suyanto,. Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018.
- Yuhelson,. Pengantar Ilmu Hukum. Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.
- Kitab undang-undang hukum pidana
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan Negara
- Angkasa, "Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 10. No. 3 (2010)
- Dia Lizza Elina, Budi Parmono, Rahmatul hidayati, "Corporate As a Criminal Act of Corruption in Indonesia" *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*. Vol. 5 No. 3 (2022)
- Budiyono. "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9, No. 3 (2009).
- Hairi, Prianter Jaya. "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia (Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* Vol. 9, no. 2 (2019)
- Jayani, Nur. "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara." *Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang*, (2013)
- Megawati Marcos. "Tinjauan Yuridis Tentang Pidanaan Terhadap Pecandu Narkotika. Fakultas Hukum." *Universitas Atma Jaya, Yogyakarta*. (2014)

Melky Essing. “Alasan Hukum Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka/Terdakwa Korupsi.”
Lex Crimen Vol. 1, No. 4 (2012).

Rakei Yunardhani. “Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.” *Jurnal Sosiologi Vol, 15.*
No, 2 (2013).

CNN Indonesia. “Mayoritas Lapas dan Rutan di Jawa Timur Over Kapasitas.” 2021.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210909195304-12-692244/mayoritas-lapas-dan-rutan-di-jawa-timur-over-kapasitas> . Access 19 September 2023

“Sistem Database Pemasyarakatan.” t.t. <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni#>.
Access 19 September 2023

<https://lapasmalang.com/profil> Access 27 November 2023